

	News Title : Mendag Zulkifli Hasan Luncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto	
	Media Name : kontan.co.id	Journalist : Istimewa
	Publish Date : 28 July 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Home	Topic : Bursa Kripto

Mendag Zulkifli Hasan Luncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto



Sumber: [Pressrelease.id](#) | Editor: [Ignatia Maria Sri Sayekti](#)

KONTAN.CO.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto pada hari ini, Jumat (28/7) di Jakarta. Peluncuran Bursa Berjangka Aset Kripto tersebut menjadi satu tonggak sejarah industri dan perdagangan Aset Kripto di Indonesia sekaligus mewujudkan ekosistem perdagangan aset kripto.

Bursa Berjangka Aset Kripto terbentuk atas kolaborasi Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan PT Bursa Komoditi Nusantara, serta didukung penuh seluruh pelaku usaha dan Asosiasi.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKOT, Kemenko Perkonomian, Rudy Salahuddin; Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen (DUJK) sekaligus Kepala Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Ijin di Sektor Keuangan, Sarjo; Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Laksmi Kusumawati mewakili BAPPENAS; Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Adi Budiarso mewakili Kementerian Keuangan; dan Kasubdit IV MUSP/ Kombes Pol. Andri Sudarnadi yang mewakili Bareskrim Polri.

Selain itu, dari kalangan pelaku usaha hadir Direktur Utama PT. Bursa Komoditi Nusantara, Subani; Plt. Direktur Utama PT Kilang Berjangka Indonesia, Budi Santoso; Direktur Utama PT. Ternet Depository Indonesia, Eric Septian Wicaksono; Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, Robby.

Turut mendampingi Mendag yaitu Sekretaris Jenderal, Suhanto; Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko; Inspektur Jenderal, Frida Adiat; Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kasan; Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan; beserta Sekretaris Bappebti, Oly Andrianita dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti.

"Bentuk inovasi kebijakan di bidang perdagangan Aset Kripto adalah pembentukan ekosistem kelembagaan. Dengan adanya ekosistem yang lengkap, masyarakat akan merasa aman dalam berinvestasi sehingga industri perdagangan Aset Kripto dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional," jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Pada 17 Juli 2023, Bappebti telah menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto (CPX) kepada PT Bursa Komoditi Nusantara, Lembaga Kilang Berjangka Aset Kripto kepada PT Kilang Berjangka Indonesia, serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Ternet Depository Indonesia.

Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI pada Forum Ekonomi Digital 2023, bahwa salah satu kunci mengembangkan ekonomi digital adalah menyeimbangkan inovasi dengan upaya menjaga kepercayaan publik. Regulasi yang ada harus bisa memberikan perlindungan konsumen dan membuat publik nyaman serta percaya dalam memanfaatkan layanan digital.

Dalam pertemuan tersebut, Mendag menegaskan, Kemendag melalui Bappebti akan terus meningkatkan pengawasan dan mitigasi risiko Perdagangan Aset kripto pada masyarakat. "Aturan dan kebijakan yang telah diterbitkan akan terus dievaluasi dan diperbarui untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lebih maksimal di tengah industri Aset Kripto yang terus berkembang dengan cepat," tandasnya.

Selain itu, Zulkifli Hasan berharap, kolaborasi dan koordinasi Bappebti dengan seluruh stakeholder, asosiasi, dan lembaga terkait lainnya diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang relevan sehingga industri ini dapat berkembang dengan optimal. "Kebijakan Bursa Aset Kripto, Lembaga Kilang dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto akan menjadikan transaksi Aset Kripto lebih transparan, efektif dan adil sehingga industri kripto di Indonesia dapat berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penanaman modal," urainya.

Mendag juga berharap, Bursa Kripto yang telah di tetapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk terus melakukan literasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat terkait risiko, manfaat, dan potensi dari Perdagangan Aset Kripto. "Hal ini penting dilakukan karena berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi karena sifatnya yang high risk high return," tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Melalui peluncuran Bursa Berjangka Aset Kripto hari ini, Mendag Zulkifli Hasan juga mengajak seluruh stakeholder Perdagangan Aset Kripto di Indonesia untuk berkolaborasi meningkatkan literasi kepada masyarakat. "Tujuannya, agar Perdagangan Aset Kripto dapat berjalan lebih konstruktif dan efektif," imbuhnya.

Mendag juga mengungkapkan dengan adanya proses pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perdagangan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK yang diatur dalam UU No. 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) maka perlu diawasi dengan baik.

"Proses pengalihan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan goncangan pada industri ini, sehingga masyarakat tidak perlu cemas dalam berinvestasi," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Direktur utama PT Bursa Komoditi Nusantara, Subani menuturkan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kripto dan aset digital, berbagai negara dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia kini semakin menyadari pentingnya regulasi yang tepat dan cermat dalam mengawasi ekosistem kripto. Regulasi ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi para pelaku industri dan pengguna kripto.

Subani juga menyampaikan, PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX) yang ditetapkan sebagai pengelola resmi perdagangan aset pada pasar kripto di Indonesia akan menjalankan tanggung jawabnya seperti arahan dari Bappebti.

"Kami berkomitmen menjamin adanya keterbukaan, tata kelola, dan transparansi, dan akuntabilitas dalam business-modelnya. Dengan dukungan key stakeholder seperti regulator, anggota bursa, lembaga kustodian, kilang, dan kalangan trader serta investor, CFX akan mengedukasi masyarakat agar literasi keuangan atas produk kripto ini makin baik di Indonesia," ungkap Subani.

Didid menegaskan bahwa pembentukan kelembagaan Aset Kripto ini adalah bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian berusaha dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan.

Dalam rangkaian acara peluncuran Bursa Berjangka Aset Kripto, juga digelar Trade Talk bertema "Satu Jam Kupas Tuntas Kripto" yang menghadirkan sejumlah narasumber dari akademisi, asosiasi, dan Bappebti serta dipandu oleh Mykster Silvana Tarigan. "Melalui Trade Talk ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang tepat kepada masyarakat tentang perdagangan aset kripto," urai Didid.

Sejak pertama kali diatur pada Juni 2018, perdagangan Aset Kripto di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Minat masyarakat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus tumbuh dalam lima tahun terakhir (2018–2023). Hingga saat ini, perdagangan aset kripto tercatat telah memiliki 17,54 juta pelanggan terdaftar dengan rata-rata penambahan pelanggan setiap bulan sebesar 490,8 ribu orang.

Pada Januari–Juni 2023 transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp 66,44 triliun, pada 2022 sebesar Rp 306,4 triliun. Nilai transaksi tertinggi pernah dicapai pada 2021 yaitu sebesar Rp 859 triliun.

Didid juga menegaskan, Bappebti terus berkomitmen memperkuat pengembangan perdagangan Aset kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, dan instansi terkait. "Penguatan literasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan mengintegrasikan media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang Aset Kripto," imbuhnya.

Tidak lupa Didid mengajak seluruh pihak yang terkait dengan Perdagangan Aset Kripto agar tetap menjalankan industri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengutamakan keamanan bagi masyarakat.